

LAPORAN

**MONITORING HASIL
PENGUKURAN KINERJA**

**PROGRAM DAN KEGIATAN,
REALISASI ANGGARAN,
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**TAHUN ANGGARAN 2025
TRIWULAN III**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar Triwulan III Tahun 2025 terdiri atas evaluasi Program/kegiatan, realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan rencana aksi merupakan sarana penyajian data dan informasi Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil evaluasi internal Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar penyajiannya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan memudahkan para stakeholder dalam mengevaluasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan hasil evaluasi Internal ini dan kami menyadari dengan segala kekurangan, bahwa laporan evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar lebih baik dimasa yang akan datang.

Benteng, 2 Oktober 2025

Kepala Dinas PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP	1
BAB II EVALUASI	
A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan	7
B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran	10
C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	
A. Permasalahan	14
B. Rekomendasi	14
BAB III PENUTUP	
A. Penutup	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, serta Permen PAN Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk **mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan** pelaksanaan **program dan kegiatan** yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara **terukur** dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara **periodik**.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Dinas dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025;
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan kedepannya.

C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

1. Peringkat : B

2. Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP)Benteng Kab. Kepulauan Selayar
3. Email : dpmptsp.selayar@gmail.com
4. Titik koordinat : **S** 6,117966, **E** 120,467171
5. Foto kantor

Gambar 1.1



1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kepala Dinas PMPTSP mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSP yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas;

- e. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Tugas Kepala Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

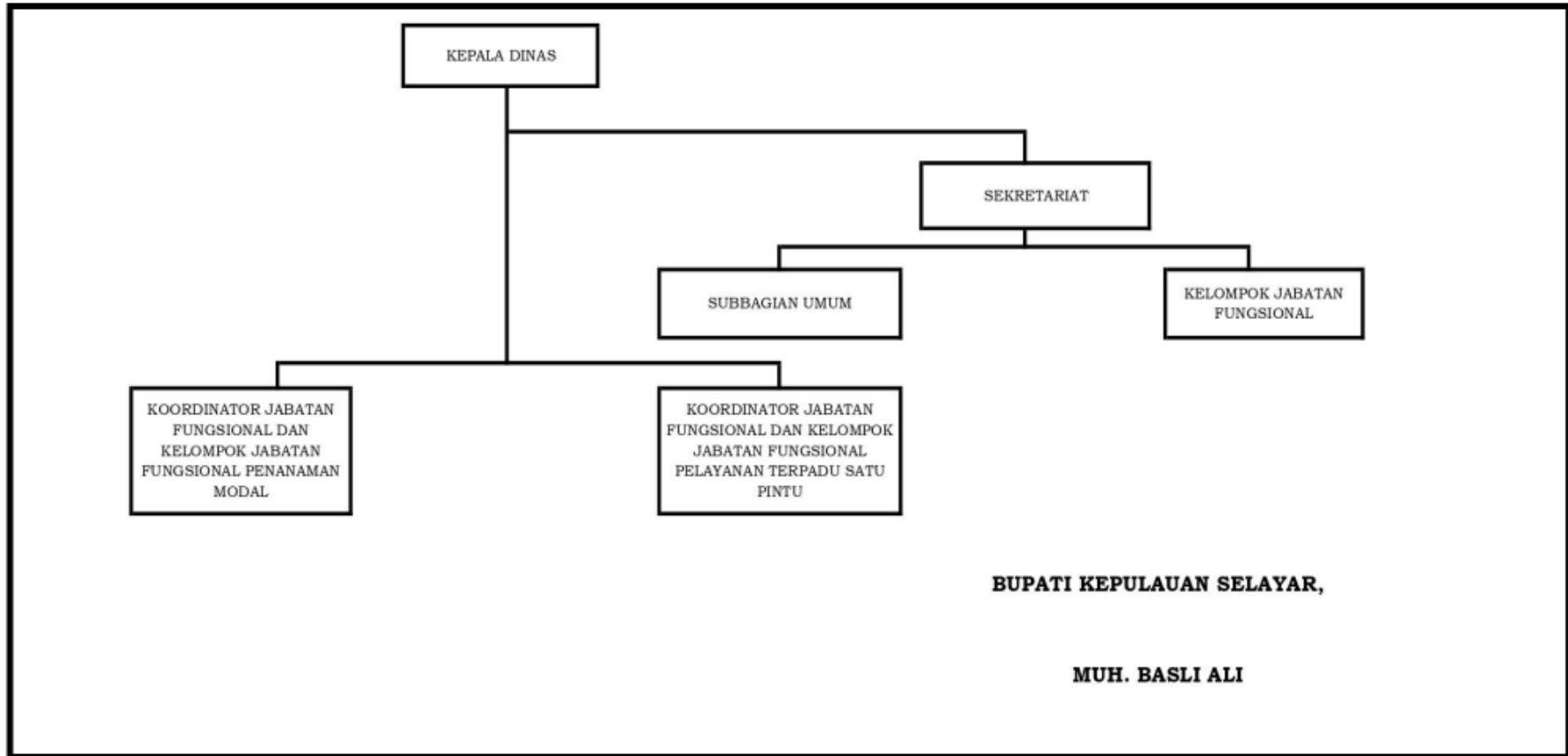
- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
- g. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- o. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - Subbagian Umum
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Jumlah Pemangku Jabatan Struktural = 3 Pegawai

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu = 12 Pegawai

Jumlah Pegawai Fungsional Pelaksana = 8 Pegawai

Jumlah Pegawai PPPK = 2 Pegawai

Untuk mengetahui sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1

Susunan Kepegawaian Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon Per 31 September 2025

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai PPPK	Pegawai PHL
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	3	3	-	6	1	1	1	3	6	-	-
2	Strata Satu (S1)	2	9	-	11	-	-	-	11	11	2	10
3	Diploma	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
4	SLTA	-	3	2	5	-	-	-	5	5	-	3
Jumlah		5	16	4	23	1	1	1	20	23	2	13

Sumber data : Subag. Umum Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Selayar September Tahun 2025

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi

pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

BAB II EVALUASI

A. Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan III tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
1	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	71,51%	50,49%	-
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	91,00%	57,71%	
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	75%	75%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	2 dok	75 %
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	-	-
	4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
	6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	-	-
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3	75%
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang akuntabel yang disusun	100 %	75%	75%
	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	25 orang/bulan	75%
	2) Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Dok	-	-

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-
	4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 dok	9 laporan	75%
	c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	75%	75%
	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	1 dok	50%
	2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	1 Dok	50 %
	3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	1 dok	50%
	d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	75%	75%
	1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1 paket	100 %
	2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3 Dokumen	60 %
	3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1050 laporan	58 kali	-
	e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia	100%	70,59	70,59
	1) Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
	2) Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-
	3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	12 unit	70,59%
	f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	66,67%	66,67%
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	100 %
	2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia	3 laporan	1 laporan	33,33 %
	g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	-	-
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 Unit	75%

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Jenis	5 unit	25%
	3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	-
	4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	4 unit	33,33%
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	32 Perusahaan	18 investor	56,25%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal	2 kali	1	50%
	1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dok	-	-
		Kegiatan pameran penanaman modal	-	-	-
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	74.500	-	-
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	74.500	-	-
	1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Pelaku Usaha	3 pelaku usaha	75%
	2) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	100%
	3) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	8 kegiatan usaha	70 kegiatan usaha	875%
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)	70%	-	-
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	20 perusahaan	-	-
	1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	2 dok	2 dok	100%
	2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif yang tersedia	-	-	-
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan (%)	100%	75,46%	75,46%

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan	1600 izin (Pelaku Usaha)	984 izin	61,5%
	1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	984 izin	65,5%
	2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	6 Kegiatan Usaha	37 pelaku Usaha	616,67 %
	3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1500 Pelaku Usaha	198 pelaku usah	13,2%
	4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100%	75%	75%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	100%	75%	75%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	3 dokumen	75%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian program dan kegiatan triwulan III tahun 2025 mencapai 50,49% atau rata-rata **rendah** karena masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum terlaksana.

B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2025 sesuai tabel sebagai berikut :

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	5	6	7
1	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.730.581.000	2.331.373.212	62,49%
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	5	6	7	8
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	-	-
		2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3.000.000	834.750	27,83%
		3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.967.800	-	-
		4) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	2.674.600	2.463.850	92,12%
		5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.943.600	-	-
		6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.851.300	1.819.910	98,30%
		7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.040.300	1.274.280	62,46%
		b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.797.109.000	1.859.197.039	66,47
		2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	-	-
		3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	-	-	-
		4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.313.000	-	-
		c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			
		1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1.322.800	-	-
		2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.000.000	-	-
		3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2.610.500	-	-
		d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.397.000	2.100.000	16,94%
		2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.620.000	1.950.000	25,59%
		3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	119.668.000	91.927.200	76,28%
		e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.325.000	-	-
		1) Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
		2) Pengadaan mebel	-	-	-
		3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	172.325.000	-	-
		f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	241.747.000	63.844.103	26,41%
		2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	253.031.100	159.358.230	62,98%
		g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	5	6	7	8
		1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	44.630.000	26.495.110	59,37%
		2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	37.010.000	7.361.000	19,89%
		3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-
		4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.320.000	4.891.740	39,71%
2.	Urusan Penanaman Modal	3. Program Promosi Penanaman Modal	131.186.100	3.474.000	2,65%
		Kegiatan Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	131.186.100	3.474.000	2,65%
		2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	131.186.100	3.474.000	2,65%
		4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
		1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5.542.000	3.436.000	62%
		2) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	48.971.000	46.700.000	95,36%
		3) Pengawasan Penanaman Modal	45.164.300	42.720.850	94,59%
		5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4.601.000	-	-
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	4.601.000	-	-
		1) penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.601.000	-	-
		6. Program Pelayanan Penanaman Modal			
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
		1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	42.641.100	21.391.080	50,17%
		2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	5.700.000	-	-
		3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	22.410.000	-	-
		4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5.235.000	-	-
		7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	14.980.000	-	-
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.980.000	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	5	6	7	8
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	14.980.000	-	-

Realisasi anggaran Triwulan III sebesar Rp. 2.449.095.142,- dari Jumlah anggaran Tahun 2025 senilai Rp. 4.057.011.500,- sehingga Persentase rata-rata capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan III tahun 2025 sebesar 57,71%.

C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan III tahun 2025 Sesuai tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024	Realisasi	Persentase Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	75,00 (BB)	56,79	81,75
			Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	75,00 (BB)	50,49	67,35
			Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	80,00%	80%	80%
2	Meningkatkan Investasi	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	2,50 %	167,85	6.714,3
			Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	12,00%	10,62	88,68
			Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	20,00%	152,58	762,99
			Persentase peningkatan nilai investasi PMA	8,00%	527,89	6570,84
			Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	80,00%	80%

BAB III

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman dan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dari bulan Januari sampai dengan September 2025, permasalahan yang terjadi adalah Serapan anggaran Dinas PMPTSP masih terbilang rendah tetapi terdapat peningkatan dari Triwulan II yaitu 38,53% ke 57,71% karena masih ada beberapa kegiatan pengadaan yang belum terealisasi yang disebabkan oleh mekanisme penggunaan aplikasi perencanaan SIPD belum sepenuhnya dipahami oleh PPTK.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi tindaklanjut untuk menghadapi masalah di atas adalah :

1. Perlunya peningkatan kompetensi PPTK terkait penerapan aplikasi SIPD sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tidak salah rekening yang menyebabkan kendala pelaksanaan kegiatan.
2. Perlu adanya kepastian anggaran taktis bagi pemerintah daerah di awal tahun sehingga tidak terjadi refocusing anggaran pada pertengahan tahun.

BAB IV
P E N U T U P

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan/subkegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, terima kasih.

Benteng, 2 Oktober 2025

Kepala PMPTSP,

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660507 198603 1 022